

Dilema PHK Akibat Covid-19



Rapidah, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Malikussaleh.

Oleh Rapidah

Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak terhindari selama wabah Covid-19 masih melanda. Perusahaan tak segan-segan mengumumkan PHK massal, meskipun pemerintah telah mengimbau sebelumnya untuk tetap mempertahankan karyawan mereka selama pandemi Covid-19 terjadi.

Akan tetapi gelombang PHK massal menjadi simalakama yang sulit dihindari. Pasalnya PHK mengundang banyaknya pengangguran yang berakibat terjadinya wabah kemiskinan, akibatnya nilai otoritas negara akan turun dengan banyaknya masyarakat yang mengalami kemiskinan dan pengangguran.

Berdasarkan informasi Kementerian Ketenagakerjaan, total jumlah pekerja yang terkena PHK sampai Mei 2020 tercatat sebanyak 1,94 juta orang. Angka ini bisa dikatakan jumlah angka tertinggi dalam beberapa tahun terakhir, di mana pada tahun sebelumnya pada 2019 jumlah PHK hanya berkisar 20 ribu orang yang terdiri dari sektor tol dan ritel.

Sedangkan pada 2018 jumlah PHK sebanyak 3.362 orang, sehingga dapat diperhitungkan jumlah PHK selama kurun 2015 - 2019 kurang lebih 1 juta pekerja. Angka ini jauh relatif lebih kecil dibandingkan dengan angka yang terjadi selama pertengahan tahun 2020 yakni 1,94 juta pekerja, dan jumlah ini terus berlanjut selama pandemi virus corona belum berakhir.

Bahaya global

PHK massal tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga melanda seluruh dunia termasuk di negara maju. Badai corona yang menyerang dunia usaha, berdampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi. Bahkan, banyak ahli memperkirakan akan terjadi pertumbuhan minus di sejumlah negara.

Organisasi Buruh Internasional (ILO) memperkirakan 195 juta orang kehilangan pekerjaan di triwulan kedua 2020. Bertambahnya angka pengangguran terbanyak diprediksi terjadi di negara-negara Arab, yakni sebesar 8,1 persen atau setara PHK terhadap 5 juta tenaga kerja, kemudian Eropa sebesar 7,8 persen sama dengan PHK 12 juta tenaga kerja, dan Asia Pasifik sebesar 7,2 persen atau sama dengan 125 juta tenaga kerja (ILO, 2020). Angka ini bisa jadi lebih tinggi lagi jika gelombang kedua pandemi yang benar-benar terjadi.

Kasus PHK yang merupakan ancaman bagi semua negara dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi agar tetap berjalan dengan baik. Pasalnya semakin banyak pengangguran yang terjadi maka semakin besar beban pemerintah dalam upaya penanganan kemiskinan dan pengangguran.

Tidak hanya itu, jumlah PHK juga akan memperburuk tingkat ekonomi masyarakat dan menurut Badan Kebijakan Fiskal (BKF) memperkirakan angka pengangguran bisa bertambah 2,9 juta sampai 5 juta orang, berdasarkan simulasi yang dibuat pemerintah. Ancaman ini tentu saja tidak bisa dianggap remeh.

Penyebab terjadinya PHK selama Covid-19 pada 2020 ini umumnya karena sistem pasar yang tidak stabil akibat *lockdown* yang terjadi di berbagai negara. Selain itu, krisis kesehatan masyarakat juga memicu terjadinya PHK, karena tidak sedikit pekerja yang dirumahkan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Selain itu, nilai kapitalisasi pasar juga semakin merosot sehingga aset perusahaan besar terus menurun. Karantina yang dilakukan di sejumlah negara membuat banyak perusahaan kesulitan mendapatkan bahan baku produksi, khususnya bahan baku yang harus didatangkan dari luar negeri.

Upaya penanganan wabah Covid-19 berimbas pada lapangan usaha masyarakat, maka solusi yang dapat ditempuh untuk sementara ini adalah mendukung program pemerintah agar Covid-19 segera berakhir secepat mungkin agar PHK tidak berlanjut.

Tanggal: 30 May 2020

Post by: [ayi](#)

Kategori: [Artikel Opini](#), [Geliat Mahasiswa](#),

Tags: [Unimal](#), [Aceh](#), [Unimal Hebat](#), [KKN](#), [Pengabdian Masyarakat](#), [Covid19](#),